

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis berkaitan dengan implementasi pemenuhan hak anak pelaku tindak pidana pembunuhan di tingkat kepolisian (POLDA DIY) maka dapat disimpulkan bahwa pihak kepolisian DIY sudah menerapkan pemenuhan hak anak pelaku tindak pidana pembunuhan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan kepolisian DIY dalam hal melakukan penyidikan tidak memandang status atau golongan anak yang melakukan tindak pidana tersebut, semua diberlakukan sama di muka hukum tanpa diskriminasi agar terwujudnya suatu penegakan hukum yang baik.

Kepolisian sampai saat ini juga masih selalu aktif dalam melakukan penyuluhan terhadap anak-anak disekolah untuk mengerti tentang perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan akibat dari perbuatan melawan hukum serta sanksi hukumnya. Kepolisian DIY juga menjadi gambaran atau cerminan bagi provinsi lain dalam hal penerapan hak anak pelaku tindak pidana.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis memberikan saran kepada kepolisian agar tetap selalu mempertahankan kinerja kerja pihak kepolisian dalam mewujudkan hak anak pelaku tindak pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Anton M. Moeliono, 1988, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.

Ari Santoso dkk, Hoegeng, 2009, Betang Pustaka, Yogyakarta.

B. Simanjuntak, 1984, Kriminologi. Tarsito. Bandung.

Bambang Mulyono , 1995. Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja Dan Penangulangnya, Kanisius, Yogyakarta.

Bimo Walgito 1982, *Kenakalan Anak*, Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta.

Kartini Kartono. 1982, Psikologi Anak, Alumni, Bandung.

Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Moeljatno, 1983, Perbuatan Pertanggung Jawaban dan Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.

Nandang Sambas, 2010, Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, Yogyakarta.

Qirom Syamsudin Meliala 1985. Kejahatan Anak Suatu Tujuan Dari Psikologi Dan Hukum Liberty, Yogyakarta.

Rocky Marbun, SH, MH, dkk, 2012, *Kamus Hukum Lengkap*, Visimedia, Jakarta.

Sadijijono, 2005, Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance, Laksbang, Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Hak anak Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66.

Undang-Undang 39 Pasal 66 Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya..

### **Internet :**

<http://anjarnawanyep.wordpress.com-konsep-restorative-justice>, diakses melalui internet pada tanggal 19 Agustus 2017.

[www.google.co.id/search?q=hak-hak+tersangka+dalam+KUHP&oq=hak-hak+tersangka+dalam+KUHP&gs\\_l](http://www.google.co.id/search?q=hak-hak+tersangka+dalam+KUHP&oq=hak-hak+tersangka+dalam+KUHP&gs_l), diakses pada tanggal 21-08-2017.

<http://suarakomunitas.net/baca/20069/pemenuhan-hak-dasar-anak/> diakses pada tanggal 30-08-2017.

<http://ririnpuspitarifr.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-anak-menurut-undang-undang.html>, diakses pada tanggal 30-08-2017.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan>, diangkses melalui internet pada tanggal 29 september 2017

<http://www.gresnews.com/berita/tips/02951-tips-dasar-hukum-larangan-pembunuhan>, diangkses melalui internet pada tanggal 29-09-2017

Depdikbud, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, hlm 1039, diunduh tanggal 22 september 2017